PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK TANAH BANGUNAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Aulia Rachmadini¹⁾, Bainil Yulina²⁾

^{1,2}Program Studi Akunansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

E-mail: auliarachmaadinidini@gmail.com, byulina@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2017-2021. Populasi ini menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh 17 kabupaten sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan (2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (3) pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Keywords : *Kontribusi pajak bumi bangunan, bea perolehan hak tanah bangunan, pajak penerangan jalan, PAD.*

1. PENDAHULUAN

Suatu daerah dianggap maju jika ia mampu membangun daerahnya sendiri baik dari segi fisik pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang dibiayai melalui dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemandirian daerah merupakan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan kemandirian daerah adalah seberapa kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sumber keuangan daerah tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Rudy Badrudin (2017:100), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Jumlah dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten/Kota sangat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan bantuan daerah tingkat 1.

Dalam hal ini pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber seefektif mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan di suatu daerah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping komponen-komponen penerimaan yang lain dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, efektivitas pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan/ pengelolaan juga harus mampu serta bersih. Pajak dapat mewujudkan peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Pajak dibagi menjadi dua diantaranya pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah. Salah satu yang menjadi jenis dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah (khususnya dalam penelitian ini pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak dalam kebijakan fiskal negara dan merupakan pusat yang unik karena sebagian besar dana yang diperoleh diserahkan kembali ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai dana pembangunan bagi daerah tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Adanya pembayaran pajak akan menjadi bentuk sumbangsih yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. Selain dari pajak pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan bangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana semakin tingginya kontribusi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1,099,308,967,841.03	166,521,800,165.00	25.84
2018	1,100,505,155,700.04	162,247,223,518.00	25.81
2019	1,657,808,205,237.47	228,823,296,672.00	26.16
2020	1,428,543,374,447.70	229,251,907,196.00	27.18
2021	1,394,458,057,851.12	241,729,019,589.00	26.21

Dari tabel 1. tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 166,521,800,165.00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 162,247,223,518.00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 228,823,296,672.00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 229,251,907,196.00 dari target, serta mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 241,729,019,589.00 dari target. Minimnya pencapaian target PBB disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kemudian yang termasuk mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan Peraturan Daerah. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1,099,308,967,841.03	146,996,045,395.00	25.71
2018	1,100,505,155,700.04	138,497,131,442.00	25.65
2019	1,657,808,205,237.47	126,917,165,831.00	25.57
2020	1,428,543,374,447.70	205,265,349,382.00	26.05
2021	1,394,458,057,851.12	177,074,309,505.00	25.90

Dari tabel 2 tampak bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 146,996,045,395.00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 138,497,131,442.00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 126,917,165,831.00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 205,265,349,382.00 dari target, serta mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 177,074,309,505.00 dari target.

Minimnya pencapaian target BPHTB disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan tanah dan bangunan. Masyarakat cenderung mengetahui adanya pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan ini dari pihak Notaris/PPAT. Padahal dalam pemungutan BPHTB ini menganut *self assesment system*, dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jika wajib pajak tidak mengetahui dasar dan ketentuan pengenaan BPHTB, wajib pajak tidak dapat menghitung sendiri BPHTB terutangnya.

Kemudian yang termasuk mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, dan tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1,099,308,967,841.03	160,594,512,360.00	25.80
2018	1,100,505,155,700.04	173,976,565,617.00	25.88
2019	1,657,808,205,237.47	179,591,451,103.00	25.91
2020	1,428,543,374,447.70	167,846,758,358.00	25.85
2021	1,394,458,057,851.12	193,056,093,174.00	25.99

Dari tabel 3 tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 160,594,512,360.00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 173,976,565,617.00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 179,591,451,103.00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 167,846,758,358.00 dari target, serta mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 193,056,093,174.00 dari target.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rio Rahmat Yusran & Dian Lestari Siregar, 2017) yang berjudul Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh (Hariadi Chandra, 2020) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kota dan Kabupaten. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017-2021 di website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga terdiri dari 16 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota
1	Lahat
2	Musi Rawas
3	Lubuk Linggau
4	Pagaralam
5	Empat Lawang
6	Muratara
7	PALI
8	OKU Timur
9	Prabumulih
10	OKU
11	Ogan Komering Ulu Selatan
12	Muaraenim
13	Ogan Ilir
14	Ogan Komering Ilir
15	Musi Banyuasin
16	Banyuasin
17	Palembang

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis data panel menggunakan SPSS 26.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menguji hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut tabel 5 menunjukkan hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.557	3.215		2.039	.045
	X1 Kontribusi PBB	.376	.163	.269	2.308	.024
	X2 Kontribusi BPHTB	.192	.071	.259	2.710	.008
	X3 Kontribusi PPJ	.251	.114	.270	2.193	.031

a. Dependent Variable: Y` Kontribusi PAD

Sumber : Output SPSS

Tabel 5 di atas memberikan hasil nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$= 6,557 + 0,376X_1 + 0,192X_2 + 0,251X_3$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 6,557. Nilai tersebut artinya apabila variabel kontribusi PBB, kontribusi BPHTB dan kontribusi PPJ sebesar 0, maka variabel kontribusi PAD akan bernilai 6,557.
2. Koefisien regresi variabel kontribusi PBB memiliki nilai sebesar 0,376. Nilai tersebut artinya jika kontribusi PBB meningkat, maka kontribusi PAD juga meningkat sebesar 0,376. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara kontribusi PBB dengan kontribusi PAD. Semakin tinggi nilai kontribusi PBB, maka tingkat kontribusi PAD juga semakin tinggi.
3. Koefisien regresi variabel kontribusi BPHTB memiliki nilai sebesar 0,192. Nilai tersebut artinya jika kontribusi BPHTB meningkat, maka kontribusi PAD juga akan meningkat sebesar 0,192. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara kontribusi BPHTB dengan kontribusi PAD. Semakin tinggi nilai kontribusi BPHTB, maka tingkat kontribusi PAD juga semakin tinggi.
4. Koefisien regresi variabel kontribusi PPJ memiliki nilai sebesar 0,251. Nilai tersebut artinya jika kontribusi PPJ meningkat, maka kontribusi PAD juga akan meningkat sebesar 0,251. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara kontribusi PPJ dengan kontribusi PAD. Semakin tinggi nilai kontribusi PPJ, maka tingkat kontribusi PAD juga semakin tinggi.

5.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.662	.638	.30058

a. Predictors: (Constant), X3 Kontribusi PPJ, X2 Kontribusi BPHTB, X1 Kontribusi PBB

b. Dependent Variable: Y Kontribusi PAD

Sumber : Output SPSS

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,638 atau sebesar 63,8%. Hal ini berarti bahwa 63,8% variasi kontribusi PAD dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen kontribusi PBB, kontribusi BPHTB dan kontribusi PPJ. Sedangkan sisanya sebesar 36,2% ($100\% - 63,8\% = 36,2\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

Uji Hipotesis

Uji Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam pengujian ini ditetapkan ketentuan bahwa jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen. Nilai $t\text{-tabel}$ dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$ atau $85-3-1=81$, dan hasil yang diperoleh untuk $t\text{-tabel}$ sebesar 1,9897. Dan jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis dapat diterima. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.557	3.215		2.039	.045
	X1 Kontribusi PBB	.376	.163	.269	2.308	.024
	X2 Kontribusi BPHTB	.192	.071	.259	2.710	.008
	X3 Kontribusi PPJ	.251	.114	.270	2.193	.031

a. Dependent Variable: Y` Kontribusi PAD

Sumber : Output SPSS

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai $t\text{-hitung}$ dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen (kontribusi PBB, kontribusi BPHTB dan kontribusi PPJ) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis. Dari hasil uji statistik t (uji parsial) di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel kontribusi PBB memiliki nilai $t\text{-hitung}$ sebesar 2,308 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $t\text{-hitung}$ lebih besar dari nilai $t\text{-tabel}$ ($2,308 > 1,9897$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,024 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kontribusi PBB memiliki pengaruh

terhadap variabel kontribusi PAD. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kontribusi PAD.

2. Variabel kontribusi BPHTB memiliki nilai t-hitung sebesar 2,710 dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,710 > 1,9897$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kontribusi BPHTB memiliki pengaruh terhadap variabel kontribusi PAD. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa kontribusi BPHTB berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kontribusi PAD.
3. Variabel kontribusi PPJ memiliki nilai t-hitung sebesar 2,193 dan nilai signifikansi sebesar 0,031. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,193 > 1,9897$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,031 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kontribusi PPJ memiliki pengaruh terhadap variabel kontribusi PAD. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa kontribusi PPJ berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kontribusi PAD.

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Uji statistik F menguji poin hipotesa bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara simultan sama dengan nol. Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1 , X_2 dan X_3 . Dalam pengujian simultan ini ditetapkan ketentuan bahwa jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Nilai f-tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 5 ($n-k-1$) atau $85-3-1 = 81$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F-tabel sebesar 2,72 (lihat lampiran uji F). Dan jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis dapat diterima. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.153	3	1.384	15.323	.000 ^b
	Residual	7.318	81	.090		
	Total	11.472	84			

a. Dependent Variable: Y Kontribusi PAD

b. Predictors: (Constant), X3 Kontribusi PPJ, X2 Kontribusi BPHTB, X1 Kontribusi PBB

Sumber : Output SPSS

Tabel 8 di atas diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 15,323 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 15,323 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,72 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontribusi PBB, kontribusi BPHTB dan kontribusi PPJ secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel kontribusi PAD.

3.2. Pembahasan

Kontribusi PBB secara parsial berpengaruh positif terhadap Kontribusi PAD

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel kontribusi PBB adalah sebesar 2,308. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($2,308 > 1,9897$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kontribusi PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kontribusi PAD.

Kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah sangat dekat karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, PBB merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah. Penerimaan dari PBB dapat menutupi sebagian besar atau bahkan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memungut PBB dari warga yang memiliki harta benda seperti tanah dan bangunan di daerahnya. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program, proyek dan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Aswandi (2019) yang menemukan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 ke tahun 2019 tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penduduk kelahiran asing di Parepare dari tahun 2015 ke tahun 2019.

Kontribusi BPHTB secara parsial berpengaruh positif terhadap Kontribusi PAD

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel kontribusi BPHTB adalah sebesar 2,710. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($2,710 > 1,9897$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kontribusi BPHTB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kontribusi PAD.

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia atas perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui transaksi seperti pembelian, warisan, hibah, dan sebagainya. BPHTB merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Penerimaan BPHTB digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan kegiatan pemerintah daerah, antara lain sebagai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan sebagainya. Penerimaan BPHTB dapat menjadi tambahan yang signifikan untuk meningkatkan pendekatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat dijelaskan oleh penelitian Rio Rahmat Yusran dan Dian Sukmanaphasy (2018). Hasil penelitian menunjukkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Negara Republik Indonesia.

Kontribusi PPJ secara parsial berpengaruh positif terhadap Kontribusi PAD

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel kontribusi PPJ adalah sebesar 2,193. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($2,193 > 1,9897$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kontribusi PPJ secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kontribusi PAD.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh U Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan produk yang wajib dibeli oleh pelanggan PLN. Bahwa hasil dari PPJ adalah satu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk memperbaiki keadaan negara dengan menitikberatkan pada pembangunan tanah, pengelolaan tanah, dan pengelolaan tanah, serta pembayaran rekening PJU sesuai dengan kemampuan masyarakat. pemerintah. Penerangan jalan menggunakan tenaga listrik untuk memperluas jalan umum yang dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia hal ini diperkuat oleh penelitian Dian Maryana (2021) Berdasarkan hasil

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi PBB, Kontribusi BPHTB dan Kontribusi PPJ secara simultan berpengaruh positif terhadap Kontribusi PAD

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), nilai F-hitung sebesar 15,323 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai F-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai F-tabel ($15,323 > 2,72$) dan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kontribusi PBB, kontribusi BPHTB dan kontribusi PPJ secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kontribusi PAD.

Semakin banyak pajak bumi dan bangunan, BPHTB, dan pajak penerangan jalan yang diterima, semakin besar kemungkinan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan suatu daerah, maka semakin rendah Pendapatan Asli Daerahnya, sehingga tergantung pada pemerintah pusat. Semakin banyak dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat, semakin besar kemampuan daerah untuk memasukkan transfer uang dalam memperoleh pendapatan daerah. Dan, karena penerimaannya berasal dari pendapatan asli daerah, maka semakin kecil dana daerah yang dihimpun dari pemerintah pusat, semakin banyak daerah otonom yang masuk.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi PAD, kontribusi BPHTB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi PAD, kontribusi PJJ secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi PAD, kontribusi PBB, Kontribusi BPHTB dan Kontribusi PJJ secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kontribusi PAD.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terus menggali potensi-potensi sumber daya yang ada dan terus meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana upaya menggali potensi-potensi sumber daya daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah ini akan menciptakan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan maju.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap kontribusi PAD, dan juga menambah tahun anggaran penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan Kabupaten/Kota di provinsi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim , Muhammad Syam Kusufi. (2019). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Jakarta : Salemba Empat
- Chandra, H. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Damayanti, Wahyu Suci Rizqi (2020) *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Study Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2017)*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Diana, Sari. (2019). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung :PT.Refika Aditama
- Fauzi, F., Wulandari, W., & Aprilia, S. (2021). *Sistem Informasi Penjualan Produk Berbasis Web Pada Chanel Distro Pringsewu*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 4, 41-47.
- Nurhafiani. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurhafiani. (2020). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat*. Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Nurkholis dan Moh. Khusaini.(2018). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang :UB Press
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d.). *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar. (2017). *Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal AKRAB JUARA Volume 2 Nomor 3 Edisi Juni 2017 (73-84)
- Siahaan Marihot. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Memahammi penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

- Triyuwono, E. (2018). *Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)*. SSRN Electronic Journal, (January 2018), 0–14.
- Yusran, R. R. dan D. L. S. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Aksara Public*, 1(3).